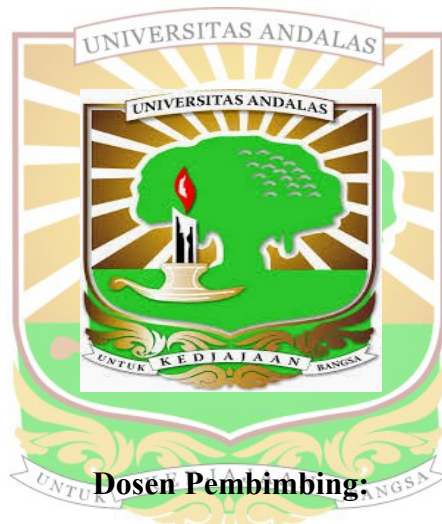


**DETERMINAN INDIKASI PERILAKU SUAP
ANGGOTA LEGISLATIF KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI RIAU
DALAM PEMBAHASAN APBD**

OLEH :

ISTIWANAH PERDANA PUTRI
1630512002



- 1. Prof. Dr. Elfindri, SE, MA**
- 2. Dr. Neng Kamarni, SE, M.Si**
- 3. Dr. Harif Amali, SE, M.Si**

**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2021**

**DETERMINAN INDIKASI PERILAKU SUAP
ANGGOTA LEGISLATIF KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI RIAU
DALAM PEMBAHASAN APBD**

Istiwana Perdana Putri, Elfindri, Neng Kamarni, Harif Amali

ABSTRAK

Pentingnya kajian indikasi perilaku suap legislator dalam penyusunan APBD karena lembaga legislatif berperan dalam merencanakan dan merumuskan kebijakan dan pengesahan anggaran membuat mereka sering menyalahgunakan APBD sehingga divonis di pengadilan. Penelitian ini bertujuan untuk menguji indikasi faktor yang mempengaruhi perilaku suap legislator dalam penyusunan APBD.

Unit analisis penelitian ini adalah anggota DPRD, sebanyak 214 legislator kabupaten/kota di Provinsi Riau dijadikan sampel. Menggunakan Teknik *Simple Random Sampling*, sampel dialokasikan secara proporsional pada kantor DPRD kabupaten/kota di Provinsi Riau. Data dikumpulkan melalui kuesioner, kemudian diolah dengan pendekatan kuantitatif metode *Structural Equation Model*. Perhitungan statistik dan pengujian hipotesis didukung dengan *tool software* AMOS. Pengujian model dilakukan dengan melihat pengaruh langsung ataupun melalui variabel moderator.

Temuan penelitian menunjukkan budaya nasional berpengaruh terhadap perilaku suap anggota legislatif kabupaten/kota di Provinsi Riau dalam penyusunan APBD. Modal sosial juga berpengaruh terhadap perilaku suap anggota legislatif kabupaten/kota di Provinsi Riau dalam penyusunan APBD. Tidak ada pengaruh modal manusia terhadap perilaku suap anggota legislatif kabupaten/kota di Provinsi Riau dalam penyusunan APBD. Sebagai variabel moderator, norma sosial berkontribusi memperkuat pengaruh hubungan antara budaya nasional dan modal sosial terhadap perilaku suap anggota legislatif kabupaten/kota di Provinsi Riau dalam penyusunan APBD. Sedangkan dalam hubungan modal manusia dengan perilaku suap, norma sosial tidak berperan sebagai variabel moderator.

Meskipun riset sudah dirancang sesuai kaedah metodologi penelitian yang baik, namun masih terdapat beberapa keterbatasan antara lain: pemetaan variabel perilaku suap dengan membuat tambahan indikator yang relevan serta melibatkan unsur budaya daerah yang berperan mempengaruhi perilaku suap legislator. Penelitian berikutnya juga dapat melihat faktor yang dapat mempengaruhi perilaku suap pada aspek anggaran dari sisi oportunistik seperti dana perimbangan, hutang/pinjaman daerah, pembiayaan lainnya.

Kata kunci - Perilaku suap, budaya nasional, modal sosial, modal manusia dan norma sosial.

THE DETERMINANT OF A BRIBERY OF LEGISLATORS IN RIAU PROVINCE

Istiwana Perdana Putri, Elfindri, Neng Kamarni, Harif Amali

ABSTRACT

The importance of studying the indications of the bribery behavior of legislators in discussing regional expenditure budget (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah/APBD) because the legislature plays a role in planning and formulating policies and budget approval, making them often misuse the APBD so that they are sentenced in court. This study aims to examine the indications of factors that influence the bribery behavior of legislators in the preparation of the APBD

The unit of analysis of this research is DPRD members, as many as 214 district/city legislators in Riau Province were sampled. Using the Simple Random Sampling Technique, the sample is allocated proportionally to the district/city DPRD offices in Riau Province. Data were collected through questionnaires, then processed using a quantitative approach with the Structural Equation Model method. Statistical calculations and hypothesis testing are supported by AMOS software tools. Model testing is done by looking at the direct effect or through moderator variables.

The research findings show that national culture influences the bribery behavior of district/city legislators in Riau Province in the preparation of the APBD. Social capital also affects the bribery behavior of district/city legislators in Riau Province in the preparation of the APBD. There is no influence of human capital on the bribery behavior of district/city legislators in Riau Province in the preparation of the APBD. As a moderator variable, social norms contribute to strengthening the influence of the relationship between national culture and social capital on the bribery behavior of district/city legislators in Riau Province in the preparation of the APBD. Meanwhile, in the relationship between human capital and bribery behavior, social norms do not act as a moderating variable.

Although the research has been designed according to good research methodologies, there are still some limitations, including: mapping of bribery behavior variables by making additional relevant indicators and involving elements of regional culture that play a role in influencing the bribery behavior of legislators. Subsequent research can also look at factors that can influence bribery behavior on the budget aspect from the opportunistic side such as balancing funds, regional debt/loans, other financing.

Keywords- Bribery, national culture, social capital, human capital and social norms.